KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Juniaris Agung Wicaksono
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun
(Email: agoeng099@gmail.com)

Abstratc

This study is aimed at both of teachers and pupils to know the construction of knowledge and also need to be aware that in the received wisdom that there are diverse interpretations. Because therein strung cultural and ethnic diversity in the form of lifestyle, social experience, personal identity, opportunities for education of the individual, so the multicultural education gives multicultural competence. It is expected that learners are able to accept differences, criticism, and have a sense of empathy, tolerance for others regardless of class, status, gender, and academic skills. Multicultural be referred to as the plurality of cultures and religions. Thus maintaining the plurality will be achieved life-friendly and full of peace. Plurality of cultures is the social and political interaction between people of different way of living and thinking in a society ideal, cultural pluralism (multicultural) means the rejection of bigotry, racism, and accept the diversity of existing inclusively.

Keywords: *multicultural education, pluralism, cultural,*

A. PENDAHULUAN

Negara multikultural merupakan sebutan yang sangat cocok untuk Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki keragamanagama dan

kepercayaan, suku, jumlah dan persebaran pulau, bahasa dan sejumlah keragaman lain. Keragaman itu merupakan potensi dan keunikanyang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar.

Akan tetapi keragaman dan keunikan tersebut selama ini belum mendapatkan kesempatan berkembang dan mengelola diri berdasarkan kearifan budaya dan kemauan hidup berdampingan secara damai. Paradigma di bidang pendidikan kita yang sangat sentralistik telah mengabaikan keragaman yang menjadi kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Perkelahian, kerusuhan, permusuhan, yang berlatar belakang etnis dan budaya silih berganti terjadi di negara ini. Negara ini diambang disintegrasi bangsa bila tidak segera mendapat penanganan yang serius.

Bangsa yang plural dengan adanya perbedaan agama, etnik, dan budaya merupakan kekayaan yang patut dipelihara dan dikembangkan oleh bangsa. Akan tetapi dibalik khazanah tersebut, membenam bom waktu yang suatu waktu akan meledak jika bersinggungan dengan kepentingan politik, agama, ras, etnis, dan budaya yang memanas.

Tidak sedikit konflik yang terjadi sekarang ini dan tidak banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah serta masyarakat sebagai bagian integral dari bangsa untuk membangun perdamaian. Hal tersebut disebabkan karena kelemahan pemerintah dan masyarakat dalam menjawab tantangan-tantangan yang rumit, seperti tantangan globalisasi yang menarik keluar kebudayaan lokal. Oleh sebab itu, konflik membudaya tanpa strategi manajemen dan penyelesaian konflik tersebut.

Dari realitas di atas, perlu tindakan sadar yakni kesadaran multikultural sebagai upaya pemecahan masalah, dalam hal ini adalah kalangan pendidikan. Kesadaran multikultural merupakan esensi multikultural yang menerapkan dan menjunjung sikap saling menghargai dan menghormati budaya yang lain tanpa meninggalkan tetapi loyal dengan budaya sendiri. Pendidikan multikultural sebagai tindakan sadar kesadaran multikultural adalah salah satu alat atau strategi untuk mencegah dan menyelesaikan konflik vertikal dan horisontal yang dilakukan sejak dini.

Pendidikan multikultural juga merupakan suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskrimainasi di dunia pendidikan. Pendidikan multikultural sebagai instrumen rekayasa sosial mendorong sekolah supaya dapat berperan dalam

menanamkan kesadaran dalam masyarakat multikultur dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleran utuk mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerjasama dengan segala perbedaan yang ada.

B. KAJIAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: TINJAUAN PUSTAKA

Situasi pendidikan sekarang ini mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi, seringkali diintrepertasikan sebagai kajian ilmu pendidikan dasar dan penerapan ilmunya. Hal ini berarti bahwa pendidikan menjadi alat pengembangan ekonomi sehingga menghilangkan tujuan pendidikan untuk membentuk manusia sebagai kesatuan holistik dan menciptakan manusia yang berorientasi kepada pengembangan ekonomi.

James Banks dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural. Jadi penekanan dan perhatian Banks difokuskan pada pendidikannya. Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajari memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*) dan interpretasi yang berbeda-beda.[1]

Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Siswa juga perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang diterima itu terdapat beraneka ragam interpretasi yang sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing, mungkin saja interpretasi itu nampak bertentangan sesuai dengan sudut pandang pandangnya. Siswa harus dibiasakan menerima perbedaan. Selanjutnya, Banks berpendapat bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan (*set of beliefs*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari

[1] Cherry A. McGee Banks and James A. Banks, *Theory into Practice*, Vol. 34, No. 3, Culturally Relevant Teaching (Lawrence Erlbaum Associates: Taylor & Francis Group), h. 153.

kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah.[2]

Pandangan Howard bahwa pendidikan multikultural memberi kompetensi multikultural.[3] Pada masa awal kehidupan siswa, waktu banyak dilalui bersamaan dengan etnis dan kulturnya masing-masing. Kesalahan dalam mentransformasi nilai, aspirasi, etiket dari budaya tertentu, memungkinkan berdampak pada primordialisme kesukuan, agama, dan golongan yang tidak sesuai porsinya. Sehingga menyebabkan timbulnya permusuhan antar etnis dan golongan. Melalui pemahaman pendidikan multikultural sedini mungkin diharapkan anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berimplikasi pada perbedaan *usage* (cara individu bertingkah laku); *folkways* (kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat), *mores* (tata kelakuan di masyarakat), dan *customs* (adat istiadat suatu komunitas).

Dengan pendidikan multikultural peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati, toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status sosial, agama, dan kemampuan akademik.[4] Dapat diasumsikan bahwa pendidikan multikultural bermakna sebagai proses pendidikan cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural, sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelenturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat.

Bahwa inti pendidikan multikultural ada dua hal yaitu:

1. Adanya dialog secara aktif dan partisipatoris. Artinya selama proses pendidikan harus dibiasakan dialog secara intensif dan partisipator sehingga siswa mampu mengembangkan pengetahuaannya secara bebas dan independen.
2. Adanya toleransi di antara siswa mapun antara siswa dan guru serta antara sesama guru. Toleransi ini dimaksudkan membudayakan

---

[2] James A. Banks, *An Introduction to Multicultural to Education*. (Boston: Allyn and Bacon, 1993), h.89.

[3] Yan Yang, Diane Montgomery, *Behind Cultural Competence: The Role of Causal Attribution in Multicultural Teacher Education, Australian Journal of Teacher Education,* vol. 36: Iss 9, 2011, h. 2.

[4] Farida Hanum, *Pendidikan Multikukltural Sebagai Sarana Membentuk Karakter Bangsa (Dalam Prespektif Sosiologi Pendidikan),* (Yogyakarta: Seminar Regional DIY-Jateng, 2009), h. 3

sikap saling menghormati, menghargai adanya perbedaan baik perbedaan pendapat maupun ideologi yang dilakukan oleh guru maupun siswa.

Ciri-ciri Pembelajaran multikultural sebagaimana yang telah di ungkapkan ciri-ciri pendidikan multikultural ada ditinjau dari tiga aspek yaitu: pertama, aspek tujuan: mewujudkan manusia dan masyarakat beradab, kedua: aspek metode: mampu mewujudkan realitas yang demoktratis, dan ketiga: aspek evaluasi: meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, maksudnya evaluasi didasarkan pada tingkah laku anak didik yang terdiri dari persepsi. Apersepsi dan tindakan terhadap budaya. Jadi berdasarkan teori di atas maka sekiranya model Pembelajaran multikultural dirancang gambaran umum sebagai berikut:

1. Proses belajar memanusiakan manusia dan belajar tidak hanya konseptual akan tetapi proses belajar itu dibangun melalui pengalaman di lapangan (kontekstual).
2. Cara kerja Pembelajaran multikultural adalah dilakukan dengan cara memberikan kesempatan munculnya ide atau gagasan dari siswa.
3. Sumber materi tidak hanya dari guru, akan tetapi berasal dari semua realitas yang ada di sekitarnya.[5]

Dengan demikian, pendidikan multikultural adalah sebuah proses pembelajaran yang dapat membimbing, membentuk dan mengkondisikan siswa agar memiliki mental atau karakteristik terbiasa hidup ditengah-tengah perbedaan yang sangat kompleks, baik perbedaan ideologis, perbedaan sosisal, perbedaan ekonomi, dan perbedaan agama.

Tujuan dan Perkembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Lingkungan pendidikan adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak faktor dan variabel utama, seperti kultur sekolah, kebijakan sekolah, politik, serta formalisasi kurikulum dan bidang studi. Bila dalam hal tersebut terjadi perubahan maka hendaklah perubahan itu fokusnya untuk menciptakan dan memelihara lingkungan sekolah dalam kondisi multikultural yang efektif. Setiap anak seyogianya harus beradaptasi diri dengan lingkungan sekolah yang multikultural. Tujuan utama dari pendidikan multikultural

[5] M.Saekhan Muchith, *Pembelajaran Kontekstual*, (Semarang: RaSAIL Media Grup, 2007), h. 167-168.

adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberi peluang yang sama pada setiap anak. Jadi tidak ada yang dikorbankan demi persatuan. Untuk itu, kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, mengakhiri perbedaan tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan. Siswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman, dan keunikan itu dihargai. Ini berarti harus ada perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai khususnya civitas akademika sekolah. Ketika siswa berada di antara sesamanya yang berlatar belakang berbeda mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka.

Perbedaan-perbedaan pada diri anak didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah/asal-usul, ketidakmampuan fisik dan mental, kelompok umur, dan lain-lain. Melalui pendidikan multikultural ini anak didik diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa.

Pendidikan multikultural paling tidak menyangkut tiga hal, yaitu: 1) ide dan kesadaran akan nilai penting keragaman budaya, 2) gerakan pembaharuan pendidikan, dan 3) proses.

1. Kesadaran Nilai Penting Keragaman Budaya

Kiranya perlu peningkatan kesadaran bahwa semua siswa memiliki karakteristik khusus karena usia, agama, gender, kelas sosial, etnis, ras, atau karakteristik budaya tertentu yang melekat pada diri masing-masing. Pendidikan multikultural berkaitan dengan ide bahwa semua siswa tanpa memandang karakteristik budayanya itu seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Perbedaan yang ada itu merupakan keniscayaan atau kepastian adanya namun perbedaan itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan. Artinya, perbedaan itu perlu diterima sebagai suatu kewajaran dan perlu sikap toleransi agar masing-masing dapat hidup berdampingan secara damai tanpa melihat unsur yang berbeda itu membeda-bedakan.

2. Gerakan Pembaharuan Pendidikan

Ide penting yang lain dalam pendidikan multikultural adalah sebagian siswa karena karakateristiknya, ternyata ada yang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar di sekolah favorit tertentu, sedang siswa dengan karakteristik budaya yang berbeda tidak memiliki kesempatan itu. Beberapa karakteristik institusional dari sekolah secara sistematis menolak kelompok untuk mendapat pendidikan yang sama, walaupun itu dilakukan secara halus, dalam arti dibungkus dalam bentuk aturan yang hanya bisa dipenuhi oleh segolongan tertentu dan tidak bisa dipenuhi oleh golongan yang lain. Ada kesenjangan ketika muncul fenomena sekolah favorit yang didomimasi oleh golongan orang kaya karena ada kebijakan lembaga yang mengharuskan untuk membayar uang pangkal yang mahal untuk bisa masuk dalam kelompok sekolah favorit itu. Pendidikan multikultural bisa muncul berbentuk bidang studi, program dan praktik yang direncanakan lembaga pendidikan untuk merespon tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi berbagai kelompok. sehingga pendidikan multikultural bukan sekedar merupakan praktik aktual atau bidang studi atau program pendidikan semata, namun mencakup seluruh aspek-aspek pendidikan. [6]

3. Proses Pendidikan

Pendidikan multikultural yang juga merupakan proses pendidikan yang tujuannya tidak akan pernah terealisasikan secara penuh. Pendidikan multikultural adalah proses menjadi, proses yang berlangsung terus-menerus dan bukan sebagai sesuatu yang langsung tercapai. Tujuan pendidikan multikultural adalah untuk memperbaiki prestasi secara untuh bukan sekedar meningkatkan skor. Persamaan pendidikan, seperti halnya kebebasan dan keadilan, merupakan ide yang harus dicapai melalui perjuangan keras. Perbedaan ras, gender, dan diskriminasi terhadap orang yang berkebutuhan akan tetap ada, sekalipun telah ada upaya keras untuk menghilangkan masalah ini. Jika prasangka dan diskriminasi dikurangi pada suatu kelompok, biasanya keduanya terarah pada kelompok lain atau mengambil bentuk yang lain. Karena tujuan pendidikan seharusnya bekerja secara kontinyu meningkatkan persamaan pendidikan untuk semua

[6] Sutarno. *Pendidikan Multikultural*, (Jakarta: Dirjen Dikti, 2007).

siswa. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan multikultural, saat ini telah mengalami perubahan jika dibandingkan konsep awal yang muncul pada tahun 1960-an. Beberapa diantaranya membahas pendidikan multikultural sebagai suatu perubahan kurikulum, mungkin dengan menambah materi dan perspektif baru. Yang lain berbicara tentang isu iklim kelas dan gaya mengajar yang dipergunakan kelompok tertentu. Yang lain berfokus pada isu sistem dan kelembagaan seperti jurusan, tes baku, atau ketidakcocokan pendanaan antara golongan tertentu yang mendapat jatah lebih, sementara yang lain kurang mendapat perhatian. Sekalipun banyak perbedaan konsep pendidikan multikultural, ada sejumlah ide yang dimiliki bersama dari semua pemikiran dan merupakan dasar bagi pemahaman pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut :

a) Penyiapan pelajar untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat antar-budaya.
b) Persiapan pengajar agar memudahkan belajar bagi siswa secara efektif, tanpa memperhatikan perbedaan atau persamaan budaya dengan dirinya.
c) Partisipasi sekolah dalam menghilangkan kekurangpedulian dalam segala bentuknya. Pertama-tama dengan menghilangkan kekurang pedulian di sekolahnya sendiri, kemudian menghasilkan lulusan yang sadar dan aktif secara sosial dan kritis.
d) Pendidikan berpusat pada siswa dengan meperhatikan aspirasi dan pengalaman siswa.
e) Pendidik, aktivis, dan yang lain harus mengambil peranan lebih aktif dalam mengkaji kembali semua praktik pendidikan, termasuk teori belajar, pendekatan mengajar, evaluasi, psikologi sekolah dan bimbingan, materi pendidikan, serta buku teks.

Pendidikan multikultural lahir sejak 30 silam, yaitu sesudah Perang Dunia II dengan lahirnya banyak negara dan perkembangannya prinsip-psinsip demokrasi. Pandangan multikultural dalam masyarakat Indonesia dalam praktik kenegaraan belum dijalani sebagaimana mestinya.

Masyarakat Indonesia sangat beragam dan tinggal di wilayah pulau-pulau yang tersebar berjauhan. Dalam Deklarasi Djoeanda laut Indonesia seluas 5,8 km2, di dalamnya terdapat lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil dan dikelilingi garis pantai sepanjang lebih dari 80.000 km, yang merupakan

garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada.[7] Hal ini menyebabkan interaksi dan integrasi tidak selamanya dapat berjalan lancar. Demikian pula kemajuan ekonomi sulit merata, sehingga terdapat ketimpangan kesejahteraan masyarakat, ini sangat rentan sebagai awal rasa ketidakpuasan yang berpotensi menjadi konflik.

Lambang Bhineka Tunggal Ika, yang memiliki makna keragamaan dalam kesatuan ternyata yang ditekankan hanyalah kesatuannya dan mengabaikan keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru menunjukan relasi masyarakat terhadap praktek hidup kenegaraan tersebut. Ternyata masyarakat kita ingin menunjukkan identitasnya sebagai masyarakat bhineka yang selama Orde Baru telah ditindas dengan berbagai cara demi untuk mencapai kesatuan bangsa. Demikian pula praksis pendidikan sejak kemerdekaan sampai era Orde Baru telah mengabaikan kekayaan kebhinekaan kebudayaan Indonesia yang sebenarnya merupakan kekuatan dalam suatu kehidupan demokrasi.[8]

Sejak jatuhya presiden Soeharto dari kekuasaannya, yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut era Reformasi, Indonesia mengalami disintregasi, krisis moneter, ekonomi, politik dan agama yang mengakibatkan terjadinya krisis kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Pada era Reformasi pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan yang memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu. Dengan kata lain pendidikan multikultural belum dianggap penting walaupun realitas kultur dan agama sangat beranekaragam.[9]

Era reformasi, membawa angin demokrasi sehingga menghidupkan kembali wacana pendidikan multikultural sebagai kekuatan dari bangsa Indonesia. Dalam era Reformasi ini, tentunya banyak hal yang perlu ditinjau kembali. Salah satunya mengenai kurikulum di sekolah kita dari semua tingkat dan jenis, apakah telah merupakan sarana untuk mengembangkan multikultural. Selain masalah kurikulum juga mengenai otonomisasi

---

[7] Prakoso Bhairawa Putra, *Strategi Pemeliharaan Batas Wilayah Melalui Penguatan Pengelolaan Tata Ruang Pulau-Pulau Kecil Terluar*, (Jurnal ISSN: 2085-871X, Edisi vol. 12/xx/Nov. 2008), h. 1.

[8] H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, *Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation, 1999), h. 16.

[9] Ruslan Ibrahim. *Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama.* (Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi. No. 1. Vol 1. 2008), h. 116.

pendidikan yang diberikan kepada daerah agar pendidikan merupakan tempat bagi perkembangan kebhinekaan kebudayaan Indonesia.

Pendidikan multikultural untuk Indonesia memang sesuatu hal yang baru dimulai, Indonesia belum mempunyai pengalaman mengenai hal ini. Apalagi otonomi daerah juga baru disampikan. Oleh sebab itu, diperlukan waktu dan persiapan yang cukup lama untuk memperoleh suatu bentuk yang pas dan pendekatan yang cocok untuk pendidikan multikultural di Indonesia. Bentuk dan sistem yang cocok bagi Indonesia bukan hanya memerlukan pemikiran akademik dan analisis budaya atas masyarakat Indonesia yang pluralis, tetapi juga meminta kerja keras untuk melaksanakannya.

Gagasan multikultural bukanlah suatu konsep yang abstrak tetapi pengembangan suatu pola tingkah laku yang hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan. Selain itu, multikultural tidak berhenti pada pengakuan akan identitas yang suatu kelompok masyarakat atau suatu suku tetapi juga ditunjukan kepada terwujudnya integrasi nasional melalui budaya yang beragam.

Dalam konteks perkembangan sistem politik Indonesia saat ini, pilihan perspektif pendidikan yang demikian memiliki peluang dan pendidikan multikultural justru sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan sistem politik yang kuat. Pendidikan multikultural sangat menekankan pentingnya akomodasi hak setiap kebudayaan dan masyarakat untuk memelihara dan mempertahankan identitas kebudayaan dan masyarakat nasional.

C. MULTIKULTURAL DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK

Otonomi daerah memungkinkan setiap daerah menampilkan kekhasannya sebagai sumber potensi. Namun di sisi lain, era otonomi daerah yang seluas-luasnya juga berdampak negatif bagi lokalitas dengan berkembangnya semangat etnosentrisme dan potensi disintegrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efek negatif tersebut tidak terlepas dari penafsiran sempit akan makna kebanggaan lokalitas. Lokalitas hanya dimaknai sebagai ruang kultural tanpa mempertimbangkan lokalitas sebagai suatu ruang politik di mana seluruh orang yang ada dalam lokalitas tersebut (dengan identitas etnis, ras, agama, dan kultur apapun) memiliki hak-hak politik yang sederajat. Maka kebanggaan yang muncul pun menjadi

kebanggaan semu yang berdiri di atas kepentingan sempit identitas suatu kelompok elit, tanpa memperhatikan kondisi massa secara keseluruhan.

Secara kultural, karakteristik masyarakat Jawa Barat sangat beragam meski secara umum sering disebut sebagai masyarakat Sunda. Seiring dengan perkembangan zaman, keanekaragaman masyarakat Jawa Barat semakin bertambah, tidak hanya dari dimensi kultural namun juga dimensi identitas (ras, etnisitas, agama). Dalam kondisi seperti inilah konsep multikulturalisme memperoleh relevansinya. Wacana multikulturalisme menjadi relevan manakala berhadapan dengan realitas kehidupan sosial di Jawa Barat yang semakin hari semakin kosmopolis. Jawa Barat tidak sekedar menjadi milik etnik Sunda semata, tapi juga menjadi tanah tempat bermukim dan berkarya berbagai etnik bahkan bangsa.

Karenanya, tidak mungkin suatu kebijakan publik dibuat dengan hanya memakai perspektif suatu etnik atau religi, meskipun etnik atau religi tersebut adalah etnik atau religi mayoritas. Dalam kondisi yang serba beragam, perumusan kebijakan publik mestinya menjadi proses kolektif yang multiperspektif, termasuk dari sisi kultural, sehingga dapat dihasilkan kebijakan publik yang mampu menjawab tantangan global dewasa ini. Para wakil rakyat yang berada di DPRD Provinsi Jawa Barat pun dituntut untuk mampu mengantisipasi tantangan zaman tersebut, yang salahsatunya tercermin dalam berbagai produk hukum yang dihasilkannya. Karenanya, pemahaman mengenai multikulturalisme serta strategi untuk menerapkannya dalam proses perumusan kebijakan publik dapat menjadi awal bagi lahirnya Perda-perda Provinsi Jawa Barat yang lebih demokratis.

Politik tidak hanya dimengerti secara formal dan kaku, tetapi lebih lugas sebagai daya upaya anggota masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka, upaya untuk bertahan menghadapi kelompok yang lebih kuat secara ekonomi, sosial, dan ideologis, termasuk upaya mereka mempertahankan pandangan hidup berupa ekspresi budaya dan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. sehingga politik tidak hanya berurusan dengan akumulasi dan manipulasi kekuasaan tetapi juga permasalahan distribusi sumber daya *(resources)* secara adil.

Bentuk nyata dari politik adalah kebijakan publik yang pada hakikatnya merupakan bentuk pengaturan distribusi sumberdaya-sumberdaya politik, baik yang berupa kekuasaan, kesejahteraan, kesehatan, keamanan, ketertiban, dll. Dalam konsep sistem politik, kebijakan publik bahkan dimaknai

sebagai bentuk konkret dari artikulasi dan agregasi berbagai kepentingan publik, baik yang berupa tuntutan maupun dukungan. Kebijakan publik berperan sebagai mekanisme otoritatif untuk mendistribusikan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menyelesaikan permasalahan kesenjangan sumberdaya tersebut. Peran penting inilah yang menyebabkan kebijakan publik harus lahir dari proses yang transparan dan melibatkan sebanyak mungkin pihak yang berkepentingan.

Namun, dalam praktiknya, kebijakan publik seringkali tidak lahir dari suatu proses yang transparan dan partisipatif. Dalam banyak kasus, kebijakan publik justru lahir dari proses yang tertutup dan elitis, sehingga peluang terjadinya distorsi antara muatan kebijakan publik dengan kepentingan publik menjadi lebih besar. Distorsi ini bisa timbul manakala kepentingan mayoritas mendominasi proses pembuatan kebijakan publik, sehingga kepentingan minoritas terkalahkan. Selain itu, keterbatasan kemampuan untuk melakukan *lobbying* dan *bargaining* dalam proses kebijakan juga dapat menyebabkan kebijakan publik yang lahir justru bertentangan dengan kepentingan publik.

Dalam konteks masyarakat yang sangat beragam, baik secara etnisitas, ideologi, religi, ras, dll., semakin sulit untuk merancang posisi yang setara di antara berbagai kelompok kepentingan karena pasti terdapat kelompok yang mayoritas dan juga terdapat kelompok yang menjadi minoritas. Kondisi ini merupakan fakta sosial yang tidak dapat dihindari. Namun, bukan berarti bahwa kondisi ini tidak dapat diubah. Di sejumlah negara, persoalan dilematis ini coba diatasi dengan menerapkan model demokrasi yang memungkinkan adanya affirmative action berupa pengakuan formal terhadap kesetaraan kelompok-kelompok masyarakat. Malaysia, Singapura, dan Thailand, misalnya, merupakan contoh negara-negara yang menerapkan model demokrasi konsosiasional di mana para anggota parlemen merupakan representasi dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada, baik secara kultural maupun politik. Melalui model demokrasi ini, diharapkan parlemen dapat menjadi ujung tombak bagi lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang multikulturalis.

Sejalan dengan model demokrasi konsosiasional, model demokrasi kosmopolitan yang diyakini mampu mengatasi kebuntuan demokrasi

liberal.[10] Model demokrasi kosmopolitan lahir sebagai respon terhadap tantangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang semakin plural bahkan tidak lagi mengenai batas-batas teritorial suatu negara. Sistem kekuasaan dipandang seperti suatu jejaring *(network)* yang saling terkait antar berbagai kelompok masyarakat dan bangsa. Jejaring kekuasaan ini meliputi seluruh institusi kekuasaan, baik di level suprastruktur maupun infrastruktur, institusi ekonomi, masyarakat sipil, dll. Demokrasi ini mengakui perbedaan-perbedaan kultural yang ada sebagai suatu kesetaraan, sehingga setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Dalam perspektif demokrasi kosmopolitan, budaya merupakan sumberdaya yang perlu menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

Pada praktiknya, model demokrasi kosmopolitan menganut sejumlah prinsip yang dapat diadopsi dalam perumusan kebijakan. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Kapasitas untuk menentukan pilihan secara mandiri. Prinsip ini mengakui bahwa semua kelompok masyarakat (termasuk juga kelompok etnik) memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan secara mandiri. Prinsip ini mengharuskan adanya komitmen terhadap otonomi dan pengakuan hak-hak dan kewajiban untuk menegakan hukum sebagai aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Adopsi terhadap prinsip-prinsip dan aturan main berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum menjadi mekanisme untuk membatasi bentuk dan ruang lingkup tindakan individual maupun kolektif dalam berbagai institusi, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun civil society. Untuk menjamin penegakan hukum, maka sejumlah standar pun ditetapkan agar ada kesetaraan bagi semua anggota masyarakat, sehingga jalan kekerasan untuk mencapai tujuan tidak dibenarkan.
3. Perumusan peraturan dan penegakan hukum. Prinsip ini berlaku bagi setiap level institusi dan seluruh anggota masyarakat, sehingga bersifat non diskriminatif. Prinsip ini juga berlaku sebagai

[10] David Held, *Globalization,Corporat Practice and Cosmopolitan Sosial Standards,* (London: London School of Economics and Political Science, 2001), h.14.

bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai praktik penggunaan kekuasaan dan otoritas lembaga pemerintahan.

4. Prioritas kolektif. Prinsip ini mendasari perumusan kebijakan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dilandaskan pada skala prioritas yang mengacu pada kepentingan publik, yakni kepentingan sebagian besar kelompok masyarakat (bukan hanya kepentingan kelompok mayoritas). Penyusunan skala prioritas dalam agenda setting kebijakan publik perlu memperhatikan komitmen terhadap otonomi demokrasi sebagai landasan bagi keberlangsungan demokratisasi.
5. Prinsip keadilan sosial. Prinsip mendasari pembuatan kebijakan sebagai mekanisme untuk menjamin distribusi sumberdaya-sumberdaya secara adil, menghindarkan eksploitasi sumberdaya untuk kepentingan sesaat atau kepentingan segelintir orang.
6. Prinsip relasi non koersif. Demokrasi kosmopolitan menekankan penyelesaian konflik melalui manajemen konflik dan mekanisme resolusi yang berbasis governance, dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Penggunaan paksaan hanya diperkenankan setelah seluruh mekanisme negosiasi tidak dapat dilakukan lagi. Namun, kekuasaan ini pun tetap diterapkan oleh institusi yang memiliki kewenangan legal untuk melakukan paksaan dan menjatuhkan sanksi.
7. Keanggotaan lintas budaya. Melalui prinsip ini, demokrasi kosmopolitan memberikan peluang bagi setiap anggota masyarakat yang berbeda-beda dapat saling berinteraksi bahkan dapat menjadi anggota dari berbagai organisasi yang beragam, tanpa memandang asal etnisitas, ras, agama, atau ideologinya. Keanggotaan organisasi kemasyarakatan bersifat terbuka, sehingga dapat memperluas akses partisipasi publik.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa multikulturalisme dan demokrasi menjadi dua sisi yang tidak terpisahkan dalam merumuskan suatu desain kebijakan publik yang mengakui kesederajatan berbagai budaya. Demokrasi tidak mungkin hidup dalam sebuah masyarakat bila demokrasi tidak diserap ke dalam dan menjadi kebudayaan serta pranata-pranata sosial dari masyarakat tersebut. Begitu pula halnya demokrasi tidak mungkin hidup bila tidak didukung nilai-

nilai budaya yang merupakan patokan bagi pedoman etika dan moral, baik secara sosial, legal, ekonomi dan politik yang berlaku pada tingkat individual maupun pada tingkat kemasyarakatan.

Prinsip demokrasi hanya mungkin dapat berkembang dan hidup secara mantap dalam sebuah masyarakat sipil yang terbuka, yaitu yang warganya mempunyai toleransi terhadap perbedan-perbedaan dalam bentuk apa pun. Kesetaraan dalam derajat kemanusiaan yang saling menghormati, yang diatur oleh hukum yang berkeadilan dan beradab yang mendorong kemajuan dan menjamin kesejahteraan hidup warganya. Tinjauan prinsip-prinsip mendasar dari demokrasi adalah kesetaraan derajat individu dengan meniadakan hierarki sosial berdasarkan atas rasial, suku bangsa, kebangsaan, ataupun kekayaan dan kekuasaan. Kemudian adanya kebebasan *(freedom),* individualisme dan individualitas, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan, konflik-konflik, dan adanya konsensus dalam proses politik; hukum yang adil dan beradab, dan prikemanusiaan.

Sebagai sebuah ide, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia. Berbagai kegiatan dalam cakupan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan pilitik, dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan. Karenanya, multikulturalisme dapat menjadi suatu strategi dari integrasi sosial di mana keanekaragaman budaya benar-benar diakui dan dihormati, sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam mengantisipasi setiap isu yang mengarah pada konflik sosial, separatisme, dan disintegrasi sosial.

Pengalaman mengajarkan, bukan semangat kemanungalan atau ketunggalan yang paling potensial akan melahirkan persatuan kuat dan kemajuan suatu masyarakat, tetapi pengakuan adanya pluralitas budaya inilah yang lebih menjamin tercapainya visi dan misi Jawa Barat menuju pembaruan sosial yang demokratis. samping itu, yang perlu kita jadikan standar secara kolektif dalam suatu komunitas sosial kehidupan bermasyarakat adanya "keajekan sosial" *(sosial consistency)* yang sama-sama kita miliki. "Keajekan sosial" tersebut berupa sistem nilai sosial, seperti etika yang harus kita sepakati dan taati secara bersama-sama oleh suatu masyarakat yang multikultural. Hal demikian akan memungkinkan realitas sosial yang multikultural tidak akan mudah terjebak dalam sebuah konflik-konflik komunal yang merugikan semua pihak. Dengan semangat

multikulturalisme, perbedaan hendaknya dipahami sebagai aset dan bukan sebagai pemicu konflik, apalagi dimanipulasi sebagai alat pertarungan kekuasaan.

D. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di setiap Negara berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing Negara. Banks mengemukakan empat pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum maupun pembelajaran di sekolah[11] yang bila dicermati relevan untuk diimplementasikan di Indonesia.

1. Pendekatan kontribusi (*the contributions approach*). Level ini yang paling sering dilakukan dan paling luas dipakai dalam fase pertamadari gerakan kebangkitan etnis. Cirinya adalah dengan memasukkan pahlawan/pahlawan dari suku bangsa/etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang selama ini sudah dilakukan di Indonesia.
2. Pendekatan aditif (*aditif approach*). Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif. Pendekatan aditif sebenarnya merupakan fase awal dalam melaksanakan pendidikan multikultural, sebab belum menyentuh kurikulum utama.
3. Pendekatan transformasi (*the transformation approach*). Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Perspektif berpusat pada aliran utama yang mungkin dipaparkan dalam materi pelajaran. Siswa doleh melihat dari perspektif yang lain. Banks menyebut ini sebagai proses *multiple*

[11] James A. Banks, *An Introduction to Education*, . . . h. 245.

acculturation,[12] sehingga rasa saling menghargai, kebersamaan dan cinta sesama dapat dirasakan melalui pengalaman belajar. Konsepsi akulturasi ganda (*multiple acculturation conception*) dari masyarakat dan budaya Negara mengarah pada perspektif bahwa memandang peristiwa etnis, sastra, music, seni, pengetahuan lainnya sebagai bagian integral dari yang membentuk budaya secara umum. Budaya kelompok dominan hanya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan budaya yang lebih besar.

4. Pendekatan aksi sosial (*the sosial action approach*) mencakup semua elemen daripendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam unit. Tujuan uama dari pembelajaran dan pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan mengajarkan keterampilan membuat keputusan untuk memperkuat siswa dan membentu mereka memperoleh pendidikan politis, sekolah membantu siswa menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Siswa memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berpartisispasi dalam perubahan sosial sehingga kelompok-kelompok etnis, ras dan golongan-golongan yang terabaikan dan menjadi korban dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat

E. MENERAPKAN PENDIDIKAN MULTIKULTUR DI SEKOLAH

Membangun masyarakat demokratis atau pendidikan multikultural, yang dapat menghasilkan masyarakat (warga negara) yang menyadari, mengakui dan menghargai perbedaan (pluralism) bukan merupakan hal yang mudah. Perlu dirancang atau didesain sedemikian rupa secara sistemik. Pada dasarnya untuk dapat menerapkan pendidikan multikultur di sekolah diperlukan upaya transformasi pada tiga level yaitu transformasi level diri (*transformation of self*), transformasi level sekolah (*transformation of school and schooling*) dan transformasi level masyarakat (*transformation of society*).[13]

[12] James A. Banks, *An Introduction to Education*, . . . 252.

[13] Paul Gorski and Bob Covert, Laporan Penilitian, *Working Definition: EdChange*

Transformasi pada level diri dapat digambarkan dengan menjawab pertanyaan, "*apakah semangat multikulturalisme telah ada atau terjadi pada diri saya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah?"* Dengan kata lain, bagaimana kita dapat melakukan pendidikan multikultur kalau sikap positif kita terhadap perbedaan dan keberaagaman belum terjadi. Nampaknya, transformasi level diri ini merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pendidikan multikultur. Untuk transformasi level sekolah, Banks memberikan panduan dimana ada lima dimensi pendidikan multikultur yang seharusnya secara simultan dilakukan, yaitu integrasi materi (*content integration*), proses pembentukan pengetahuan (*knowledge construction process*), reduksi prasangka (*prejudice reduction*), pendidikan/perlakuan pedagogic tanpa pandang bulu (*equity pedagogy*), dan pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial(*empowering school culture and sosial structure*).[14]

Integrasi konten adalah upaya guru memberikan atau menggunakan contoh dan materi dari berbagai budaya dan kelompok untuk mengajarkan konsep kunci, pronsip, generalisasi, teori dan lain-lain ketika mengajar satu topik atau mata pelajran tertentu. Sebagai contoh, ketika mengajar topik tumbuhan berbiji belah (dikotil), guru menyinggung bahwa kopi adalah salah satu contoh dikotil, kemudian dikaitkan dengan bagaimana masyarakat Lampung, masyarakat Aceh, masyarakat Jawa memanfaatkan kopi sebagai minuman dalam tradisi masing-masing. Artinya, yang dimaksud dengan integrasi konten adalah mengintegrasikan pendidikan multikultur ekdalam mata pelajaran/topik pelajaran. Dengan kata lain, sambil belajar biologi, terjadi penyadaran akan perbedaan budaya.

Proses pembentukan pengetahuan adalah upaya membantu siswa untuk memahami, mencari tahu, dan menentukan bagaimana suatu pengetahuan atau teori pada dasarnya secara implisit tercipta karena adanya pengaruh budaya tertentu, kalangan tertentu, kelompok dengan status sosial tertentu yang terjadi pada saat itu. Sebagai contoh, Galileo menghasilkan teori heliosentris yang menumbangkan asumsi geosentris yang terjadi pada masa dimana pengaruh agama saat itu sangat dominan. Sehingga, Galileo harus dihukum mati karena teorinya, namun belakangan teori tersebut dipakai oleh masyarakat dunia. Reduksi prasangka adalah upaya guru membantu

MUlticultural Pavilion, 2000, h. 2.

[14] James A. Banks, Artikel, *Multicultularalism's Five Dimensions*, 1998, h.1.

siswa mengembangkan sikap positif terhadap perbedaan (baik dari sisi suku, budaya, ras, gender, status sosial, dll.) Sebagai contoh, adalah tidak benar kalau guru mendorong sikap atau prasangka yang menganggap bahwa orang papua yang berkulit hitam adalah terbelakang, bodoh dan lain-lain.

Prasangka-prasangka yang tidak benar terhadap gender, ras, budaya dan lain-lain dalam proses interaksi di sekolah inilah yang harus dihindari. Setidaknya guru berkewajiban meluruskan asumsi dan prasangka tersebut. Salah satu cara mengurangi prasangka ini adalah dengan melibatkan siswa melakukan aktifitas bersama dengan mereka yang terdiri dari berbagai status sosial, ras, gender dan lain-lain.

Perlakuan pedagodik tanpa pandang bulu (*equity pedagogy*) adalah upaya guru memperlakukan secara sama tanpa pandang bulu dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini akan terlihat dari metode yang digunakan, cara bertanya, penunjukkan siswa, pengelompokkan siswa. Contoh *inequity pedagogy* adalah guru senantiasa menunjuka seorang siswa sebagai ketua kelompok, karena siswa tersebut anak dari kalangan status sosial tertentu yang lebih tinggi dari yang lain.

Pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial proses merstrukturisasi danreorganisasi sekolah sehingga siswa dari beragam ras, suku, kelas sosial akan mengalami dan merasakan pemberdayaan dan persamaan budaya. Dengan demikian, semangat multikulturalisme harus tercermin dalam segala aktifitas sekolah. Hal ini menuntut adanya perubahan baik dari sisi literasi multikultur pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan sekolah, struktur organisasi, iklim sekolah dan lain-lain. Transformasi level masyarakat merupakan upaya yang paling berat dan karena sangat kompleks dan melibatkan berbagai unsur terkait. Namun, sebenarnya transformasi level masyarakat akan terjadi dengan sendirinya jika transformasi level diri dan level sekolah berjalan dengan baik.

F. KESIMPULAN

Di Indonesia pendidikan multikultural relatif belum dikenal sebagian besar guru-guru. Oleh sebab itu, sosialisasi tentang pendidikan multikultural penting untuk terus dilakukan, baik yang berbentuk seminar, penataan, *workshop*, curah pendapat maupun penyediaan buku-buku penunjang. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam, sangat tepat dikelola dengan

pendekatan nilai-nilai multikultural agar interaksi dan integrasi dapat berjalan dengan damai, sehingga dapat menumbuhkan sikap kebersamaan, toleransi, humanis, dan demokratis sesuai dengan cita-cita negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam konteks kehidupan masyarakat yang pluralis, pemahaman yang berdimensi multikultural harus dihadirkan untuk memperluas wacana pemikiran manusia yang selama ini masih mempertahankan ”egoisme” kebudayaan dan keragaman. Bahwasanya multikultural dapat diartikan pula sebagai pluralitas kebudayaan dan agama. Dengan demikian memelihara pluralitas akan tercapai kehidupan yang ramah dan penuh perdamaian. Pluralitas kebudayaan adalah interaksi sosial dan politik antara orang-orang yang berbeda cara hidup dan berpikirnya dalam suatu masyarakat secara ideal, pluralisme kebudayaan (multikultural) berarti penolakan terhadap kefanatikan, purbasangka, rasisme, tribalisme, dan menerima secara inklusif keanekaragaman yang ada.

Sikap saling menerima, menghargai nilai, budaya, keyakinan yang berbeda tidak otomatis akan berkembang sendiri. Sikap ini harus dilatihkan dan dididikkan pada generasi muda dalam sistem pendidikan nasional. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai dan mampu secara profesional mengajar mata pelajaran, lebih dari pada itu, seorang guru harus mampu menanamkan nilai-nilai multikultutal untuk tercapainya bangsa Indonesia yang demokratis dan humanis.

DAFTAR PUSTAKA

Banks, Cherry A. McGee. and Banks, James A. *Theory into Practice*, Vol. 34, No. 3, Culturally Relevant Teaching, Lawrence Erlbaum Associates ,Taylor & Francis Group.

Banks, James A. 1993. *An Introduction to Multicultural to Education*. Boston: Allyn and Bacon.

Banks, James A. 1998. Artikel, *Multicultularalism's Five Dimensions*.

Gorski, Paul. and Covert, Bob. 2000. Laporan Penilitian, *Working Definition: EdChange MUlticultural Pavilion.*

Hanum, Farida. 2009. *Pendidikan Multikukltural Sebagai Sarana Membentuk Karakter Bangsa (Dalam Prespektif Sosiologi Pendidikan),* Yogyakarta: Seminar Regional DIY-Jateng.

Held, David. 2001. *Globalization,Corporat Practice and Cosmopolitan Sosial Standards,* London: London School of Economics and Political Science.

Ibrahim, Ruslan. 2008. *Pendidikan Multikultural: Upaya Meminimalisir Konflik dalam Era Pluralitas Agama,* Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi. No. 1. Vol 1.

Muchith, M.Saekhan. 2007. *Pembelajaran Kontekstual*, Semarang: RaSAIL Media Grup.

Putra, Prakoso Bhairawa. 2008. *Strategi Pemeliharaan Batas Wilayah Melalui Penguatan Pengelolaan Tata Ruang Pulau-Pulau Kecil Terluar*, Jurnal ISSN: 2085-871X, Edisi vol. 12/xx.

Sutarno. 2007. *Pendidikan Multikultural*, Jakarta: Dirjen Dikti.

Tilaar, H.A.R. 1997. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, *Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Yayasan Adikarya IKAPI dan Ford Foundation.

Yang , Yan. Montgomery, Diane. 2011. *Behind Cultural Competence: The Role of Causal Attribution in Multicultural Teacher Education, Australian Journal of Teacher Education,* vol. 36.